Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi

Criminal Action Treatment Of Narcotics Abuse Treatment Narcotics in Police SATRES Tebing Tinggi Police

Dian Herdian Silalahi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Januari 2019; Diterbitkan: Februari 2019

Email: dianherdiansilalahi@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang diteliti disini adalah upaya penanggulangan, hambatan dan upaya ke depan pada tindak pidana narkotika di wilayah Polres Tebing Tinggi, Metode yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika melalui tiga cara yaitu preemtif, prefentif, dan refresif.

Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

The problems examined in this thesis are how to deal with narcotics crime in the area of Tebing Tinggi police station, what are the obstacles in the handling of narcotics crime in the area of Tebing Tinggi police station and how will future efforts be made to overcome barriers in narcotics crime in the police area of Tebing Tinggi. The method used in this thesis research is normative or doctrinal legal research, researchers use normative legal research or doctrinaire which is also called library research or document study. Based on the results of the study, it can be seen that the prevention of criminal acts against drug abuse through three ways, namely pre-emptive, preventive, and refresive.

Keywords: Criminal Countermeasures, Narcotics Abuse

How to Cite: Silalahi, D.H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi, 5 (2): 60- 67.

PENDAHULUAN

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagai mana dilihat penegakan diberbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan ilegal logging, kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya, dimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum (Ediwarman, 2014).

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Berdasarkan kamus hukum, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya (Sudarsono, 2009).

Narkotika dan zat-zat lainnya yang dalam golongan NAPZA ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal candu. Pada saat

itu, candu digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur (Sofiyah, 2009).

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Penanggulan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban.

Seorang yang hanya menggunakan narkoba bukan pengedar ataupun bandar berada dalam persimpangan peran, sebagai pelaku atau sebagai korban. Di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04/Tahun 2010 yaitu: terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan barang bukti untuk ganja 5 gram, surat ijin laboratorium positif menggunakan narkotika, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran Narkotika dan adanya keterangan ahli yang menerangkan seberapa besar kondisi/taraf kecanduan dari terdakwa.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit states*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai (Dahlan, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau doktriner, peneliti menggunakan

penelitian hukum normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada misalnya dalam perilaku hukum, kepatuhan hukum dan lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat serta penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polres Tebing Tinggi

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasarkan hukum. Di Inggris digunakan istilah "Police" yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum (Kelana, 1994).

Hakikatnya ruang lingkup tugas dan fungsi diatur dalam Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia dan KUHAP. Sebagai lembaga penegak hukum berdasarkan KUHAP, hakikatnya kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Asmarawati, 2015).

Idealnya hukum harus tetap ditegakkan apapun iming-iming yang disodorkan oleh para pelaku kejahatan (Bandar Narkoba). Penegakan hukum itu tidak kenal kompromi dan tidak pandang bulu. Namun secara sosiologis sering kali tidak demikian karena menegakkan hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian putusan ditengah berbagai kebutuhan ekonominya selain keperluan individual lain.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi ada 3 cara yaitu melalui upaya preemtif, preventive, dan refresif. Tindakan preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen).

Preemtif (Pembinaan) Merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan Polres Tebing Tinggi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan cara preemtif yaitu: 1) Melakukan himbauan melalui penyiaran radio. Penyiaran di Radio lokal Tebing Tinggi yaitu Radio DIS FM. Yang beralamat di jl Yos Sudarso, Tj Marulak Hilir, Rambutan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 20998; 2) Melakukan himbauan melalui spanduk-spanduk dan baliho yang berisi himbauan

tentang bahayanya narkoba; 3) Melakukan himbauan melalui pembagian Brosur. Yang berisi tentang himbauan bahayanya narkoba; 4) Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan.

Tindakan lain yang dilakukan oleh SAT RES Narkoba Tebing Tinggi: 1) Melakukan patroli pada wilayah rawan narkoba di Tebing Tinggi; 2) Melakukan razia di perbatasan-perbatasan daerah/wilayah Polres Tebing Tinggi; 3) Membuat cring Narkoba (melakukan penempatan personil di wilayah rawan narkoba); 4) Melakukan monitoring dan pengawasan wilayah sesuai penugasan dan memberi informasi kepada SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi terkait adanya tindak pidana narkoba di wilayah penugasannya.

Secara Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.

Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polres Tebing Tinggi

Terdapat empat hambatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polres Tebing Tinggi yaitu, Hambatan Undang-undang, Hambatan Pidana Penjara, Hambatan Pendanaan, dan Hambatan Aparatur Penegak Hukum.

Hambatan undang-undang adalah Narkotika tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkoba yang baru atau tidak ada di dalam undang-undang, sehingga pelaku pengedar penyalahgunaan Narkotika bisa berbuat semau mereka karena belum adanya peraturan undang-undang Narkotika jenis baru di dalam undang-undang Narkotika.

Hambatan dalam Pidana Penjara yaitu Problem yang muncul dapat terjadi diberbagai unsur yang terlibat dalam proses pemasyarakatan. Kehidupan dibalik jeruji besi dengan berbagai latar belakang yang berbeda membuat kehidupan masyarakat narapidana terkelompok sedemikian rupa sehingga terjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Peredaran narkoba masih terjadi di lapas. Faktanya, mereka di lapas itu bukan semakin sembuh, tetapi menjadi parah, bahkan setelah keluar menjadi pengedar.

Penjara justru menjadi semacam sekolah bagi para penyalah guna untuk menjadi pengedar narkoba. Pergaulan dengan pengedar membuat seseorang pengguna narkoba memiliki kemampuan untuk turut menjadi pengedar juga.

Memerjatkan pengguna narkoba justru akan membuat persoalan baru dengan over kapasitas lapas suplay orang kedalam harus dikurangi, dimulai dari *victimless crime* seperti pengguna narkoba. Pidana mati atau pidana penjara ditekankan oleh Matius Arif Miradjaja tidak juga memberikan sebuah efek jera, malah data pengguna narkoba makin meningkat pasca eksekusi pidana mati. Berdasarkan data BNN di Tahun 2015, kenaikan persentase pengguna narkoba menurut kepala BNN mencapai 40%. Angka penggunaan narkoba menurut kepala BNN justru meningkat signifikan dalam periode Juni hingga November 2015 sebesar 1.7 juta jiwa.

Hambatan Pendanaan yaitu hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkoba.

Hambatan Aparatur Penegak Hukum yaitu Berdasarkan hasil wawancara

dengan Penyidik SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi Aipda Edi. S menyatakan bahwa Teknik peredaran narkoba saat ini yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik.

Upaya Kedepan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penganggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Tebing Tinggi

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, perlakuan yang seperti ini bukan lagi merupakan jalur tempuh yang hakiki sebab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba BAB IX bagian kedua Pasal 54 telah menggariskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inilah yang seharusnya menjadi bahan acuan bagi penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak pelaku dikategorikan sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba (Irwan Jasa Tarigan, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASAT RES Narkoba AKP. Dedi Dharma personil Polres Tebing Tinggi harus menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba yang di atur di dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 undang-undang Narkotika dengan cara sosialisasi dan membuat sepanduk serta baliho di wilayah Tebing Tinggi. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat yang tercantum di dalam undang-undang Narkotika maka kelemahan dari Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, menjadi kekuatan untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Polres Tebing Tinggi.

Adapun isi Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 undang-undang Narkotika

adalah sebagai berikut: 1) Pasal 104 UU Narkotika: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2) Pasal 105 UU Narkotika: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

3) Pasal 106 UU Narkotika: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk: a) Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; b) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; c) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menerangi perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; d) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; e) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

4) Pasal 107 UU Narkotika: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut hasil wawancara dengan KASAT Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP Dedi Dharma mengatakan bahwa pidana penjara harus efektif dilakukan yang mana hakim dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam mengambil keputusan harus mengetahui apakah seorang tersangka dapat dijatuhi pidana penjara yang setimpal. Hakim juga harus dapat membedakan subjek hukum antara pengguna narkoba dengan pengedar narkoba. Sehingga apabila hakim telah paham dan dapat membedakan subjek hukum maka hakim tidak akan keliru di dalam melaksanakan putusan yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Berdasarkan wawancara dengan IPTU. Wakin Silitonga KANIT I SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi maka upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pendanaan (Angaran) tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan terkait dengan kelemahan anggaran: 1) Dengan cara membuat pengajuan anggaran kepada KARO RENA (kepala biro perencanaan) Polda melalui bagian perencanaan Polres Tebing Tinggi; 2) Melakukan kerja sama dengan instansi lain terkait dalam rangka P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) serta BNN; 3) Mengajukan pendanaan untuk alat pendeteksi narkotika serata pengadaan alat transportasi bagi personil SAT RES Narkoba di Polres Tebing Tinggi; 4) Terkait metode *undercover buy* yaitu dengan cara personil membeli langsung ke penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KBO (Kaur Bin Ops) Polres Tebing Tinggi IPTU. J NAINGGOLAN mengenai upaya yang dilakukan kedepan terhadap kendala di bidang personil SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu dengan cara: 1) Personil SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi di beri pendidikan atau pelatihan tentang penggunaan ilmu teknologi sehingga dapat menggunakan alat IT agar dapat mendeteksi pelaku dan jaringan narkotika di wilayah Tebing Tinggi; 2) Personil SAT RES Narkoba

Polres Tebing Tinggi melakukan pendidikan kejuruan di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika. Dan personil SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi diharuskan bagi penyidik harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar wawasan dan pemahaman tentang undang-undang Narkotika dapat lebih memahami sehingga dapat melakukan penyidikan terhadap modus operandi yg lebih terorganisir.

Peran Polda Sumut dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika di masa mendatang perlu diperkuat dengan mewujudkan keterpaduan Sistem peradilan pidana karena hakikat penyelenggaraan peradilan pidana mengemban tugas yang sangat berat, yaitu: 1) Melindungi masyarakat dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, serta melakukan tindakan terhadap orang yang merupakan ancaman bagi masyarakat; 2) Menegakkan dan memajukan serta penghormatan terhadap hukum, dengan menjamin adanya proses yang manusiawi dan adil serta perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Kemudian melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan; 3) Menjaga Hukum dan Ketertiban; 4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut; 5) Membantu dan memberi nasihat kepada korban kejahatan (Harkrisnowo, 2004).

SIMPULAN

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan 3 cara yaitu 1) Prevetif yaitu kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen); 2) Preventif (pencegahan),

yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan.; dan 3) Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.

Hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah: 1) Hambatan dalam undang-undang, yaitu masih banyaknya undang-undang yang tidak sesuai dan belum berjalan sebagai mana mestinya; 2) Hambatan dalam aparatatur penegak hukum, yaitu masih kurangnya ilmu pengetahuan tentang pemahaman undang-undang narkotika bagi personil SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi; 3) Hambatan dalam pendanaan, yaitu masih kurangnya pendanaan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dari hal akomodasi dan alat transportasi bagi personil Polres Tebing Tinggi serta kurangnya pendanaan untuk pengadaan alat penunjang dalam mendeteksi adanya penyalahgunaan narkoba; 4) Hambatan pidana penjara, yaitu di dalam hambatan pidana penjara belum menjamin untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pidana penjara menjadi sekolah bagi pelaku dari pengguna menjadi pengedar

Upaya kedepan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dari segi undang-undang harus merevisi undang-undang yang tidak efektif, dari segi aparatatur penegak hukum SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan pendidikan kejuruan serta mengikuti seminar nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, dari segi pendanaan satres melakukan pengajuan kepada KARO RENA (kepala biro perencanaan) polda melalui BAG perencanaan Polres Tebing Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarawati, T, (2015), *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ediwarman, (2016), *Metodelogi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ediwarman, (2014), *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Harkrisnowo, H, (2004), *Mendorong Kinerja Polri melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Kelana, M, (1994). *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia.
- Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofiyah. (2009), *Mengenal Napza dan Bahayanya*. Jakarta: Be Champion.
- Tarigan, I.J, (2017), *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish.